

ABSTRAK

Berdasarkan data Kementerian Kelautan dan Perikanan, Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan jumlah pulau sebanyak kurang lebih 17.504 pulau dan memiliki garis pantai sepanjang 108.000 km menjadikan Indonesia sebagai Negara dengan garis pantai terpanjang kedua di dunia setelah Kanada. Potensi sumber daya kelautan dan perikanan yang dimiliki bangsa Indonesia merupakan potensi yang dapat dioptimalkan pengelolaannya. Namun, masih banyak pelanggaran yang dilakukan oleh Nelayan dalam eksploitasi potensi kelautan dan perikanan yang menyebabkan ketidakseimbangan laut hingga kerusakan ekosistem laut. Adapun rumusan masalah yang diangkat adalah bagaimana pengaturan hukum tindak pidana perikanan terhadap *illegal fishing* serta bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap pelaku *illegal fishing*.

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu Penelitian Yuridis Normatif dimana penulisan ini akan meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar, maka teknik pengumpulan data yang digunakan adalah Studi Kepustakaan (*Library Research*). Selanjutnya setelah data-data yang diperlukan terkumpul maka penulis melakukan analisis terhadap kasus yang berkaitan dengan materi skripsi ini.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan telah membuat dan membentuk peraturan yang terkait dengan tindak pidana perikanan, 2) Penerapan sanksi pidana Tindak Pidana Perikanan belum berjalan secara optimal.

Kata Kunci : Pertanggungjawaban pidana, Tindak pidana perikanan, Nelayan

ABSTRACT

Based on data from the Ministry of Marine Affairs and Fisheries, Indonesia is the largest archipelago in the world with approximately 17,504 islands and has a coastline of 108,000 km making Indonesia the country with the second longest coastline in the world after Canada. The potential of marine and fishery resources owned by the Indonesian nation is a potential that can be optimized for management. However, there are still many violations committed by fishermen in the exploitation of marine and fishery potential that cause marine imbalances to damage marine ecosystems. The formulation of the issues raised is how to regulate the law of fisheries against illegal fishing and how to apply criminal sanctions against illegal fishing perpetrators.

The type of research used in the writing of this thesis is Normative Juridical Research where this writing will examine library materials or secondary data as basic materials, then the data collection technique used is Library Research. Furthermore, after the necessary data is collected, the author conducts an analysis of cases related to this thesis material.

The results showed that 1) the Government of Indonesia through the Ministry of Marine Affairs and Fisheries has created and formed regulations related to fisheries crimes, 2) The application of criminal sanctions of Fisheries Crimes has not run optimally.

Keywords: Criminal Liability, Fisheries Crime, Fishermen